

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAHAN (LKJ-IP)  
TAHUN ANGGARAN 2018  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN DAERAH**



**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dapat diselesaikan. LKJ-IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJ-IP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJ-IP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan LKJ-IP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Pangkajene Sidenreng, 23 Januari 2019

**Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan  
Dan Pelatihan Daerah  
Kabupaten Sidenreng Rappang**



**SUDIRMAN BUNGLI, S.IP., M.Si**  
**N I P : 19700827 199009 1 002**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
Bab I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	2
D. Sistematika Laporan .....	2
Bab II. PERENCANAAN KINERJA .....	3
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	4
Bab IV. PENUTUP .....	6
	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya 2 (dua) paket kebijakan Otonomi Daerah yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi diatas, selain memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan prakarsa, potensi dan aspirasi masyarakatnya juga menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip *good governance* melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak

semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKJ-IP) dan Peraturan MEMPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun LKJ-IP untuk tahun anggaran 2018 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2019.

## **B. DASAR**

Adapun dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Surat Bupati Sidenreng Rappang No. 130.1/120/061/2018. Tanggal 18 Desember 2018 perihal penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja 2019.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan Untuk :

- a. Memberikan gambaran terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.
- b. Mendorong setiap instansi pemerintah Khususnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk dapat menjalankan tugas dan

fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur.

- c. Menetapkan Kinerja Tahun 2019 yang sedang dan akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan/program prioritas.

## 2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Tahun 2018 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang :

- a. Mewujudkan akuntabilitas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun 2018.
- b. Sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang.
- c. Tersedianya Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencanaan dan Perajukan dalam menetapkan kegiatan berdasarkan rencana strategis.

## **D. SISTIMATIKA LAPORAN**

Sistimatika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV : PENUTUP

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Untuk Menyelesaikan Permasalahan yang terjadi dalam suatu proses pembangunan khususnya pembangunan manusia (ASN) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka diperlukan strategi yang dapat mempercepat dalam keberhasilan Pembangunan tersebut, peran serta seluruh komponen yang terkait perlu ditingkatkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 diprioritaskan pada sasaran dan target sebagai berikut :

#### 1. Rencana Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%
2	Terwujudnya Prestasi Kerja Yang Profesional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	214 Orang
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	Jumlah sarana dan prasara aparatur yang diadakan dan dipelihara	53 Unit
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai dan Keluarganya	Jumlah ASN yang Mendapatkan Penghargaan	264 Orang

## 2. Program dan Anggaran

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	783.008.200
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	138.550.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5.104.000
4	Program Fasilitasi Pindah/purna Tugas	48.571.000
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	721.431.000
6	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	31.255.000
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.385.423.600
8	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	70.931.200
<b>Jumlah</b>		<b>3.184.274.000</b>



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ini akan dijelaskan capaian indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian Kinerja IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara Ringkas digambarkan sebagai berikut :

No	Urusan	Program/Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Pemerintahan Umum	Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
		Terwujudnya Prestasi Kerja Yang Profesional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	Jumlah sarana dan prasara aparatur yang diadakan dan dipelihara
		Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai dan Keluarganya	Jumlah ASN yang Mendapatkan Penghargaan

### 1.1. Capaian Kinerja

Dari hasil Pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan di Tahun 2018 dengan berbagai kendala. Rincian analisis Capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1 Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan administrasi kepegawaian.

Analisis pencapaian **Sasaran 1 :Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan administrasi kepegawaian.**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Pelayanan Prima dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	100
	2	Kebersihan kantor	Bulan	12	12	100
	3	Pengelolaan Data ASN	Orang	1.900	2.386	125,57
	4	Pelayanan Izin Cerai Permasalahan Keluarga	Orang	7	9	128,57
	5	Pindah/purna Tugas ASN sesuai prosedur	Orang	100	85	85
<b>Rata-rata Capaian</b>						<b>107,82</b>

Dari 5 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 4 indikator kinerja sasaran memenuhi target dan 1 indikator yang tidak mencapai target dapat dilihat dari Rata-rata capaian untuk semua indikator adalah 107,82 persen. Di samping pemenuhan target yaitu pada indikator sasaran pelayanan izin cerai permasalahan keluarga sebenarnya merupakan target yang diharapkan bisa ditekan tiap tahunnya maka apabila melebihi dari target maka bukan merupakan prestasi melainkan ketidakberhasilan instansi dalam memediasi ASN dalam permasalahan keluarganya, maka dari itu menjadi bahan catatan kedepannya untuk lebih memberikan perhatian lebih dengan kasus serupa.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100
2	Kebersihan kantor	100	100	100	100	100
3	Pengelolaan Data ASN	100	71,64	110,93	119,03	125,57
4	Pelayanan Izin Cerai Permasalahan Keluarga	100	100	146,15	10	128,57
5	Pindah/purna Tugas ASN sesuai prosedur	100	103,44	104,44	95,62	85
<b>Rata-rata Capaian</b>		<b>100</b>	<b>95,01</b>	<b>112,30</b>	<b>84,93</b>	<b>107,82</b>

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	60	60	100
2	Kebersihan kantor	Bulan	60	60	100
3	Pengelolaan Data ASN	Orang	12.370	12.370	100
4	Pelayanan Izin Cerai Permasalahan Keluarga	Orang	76	69	90,78
5	Pindah/purna Tugas ASN sesuai prosedur	Orang	518	497	95,94
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>97,34</b>

**d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan administrasi kepegawaian** ini didukung dengan adanya program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk memberikan pelayanan prima kepada aparatur yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk beberapa indikator yang belum mencapai target yaitu pada indikator pelayanan izin cerai permasalahan keluarga memang tidak bisa diprediksi sehingga target tidak terpenuhi namun dalam segi pelayanan pada dasarnya memang suatu keharusan, sama halnya dengan indikator pindah/purna tugas ASN sesuai prosedur yang tidak bisa diprediksi misalkan ada pegawai yang mengajukan pensiun dini ataupun diberhentikan dengan tidak hormat.

**e. Analisis atas efisiensi Penggunaan sumberdaya**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan administrasi kepegawaian** ini adalah sebesar Rp. 413.798.700 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 363.115.200 atau 87,75 persen.

**f. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran **Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan administrasi kepegawaian** ini adalah sebanyak 4 program dan 4 kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
2	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	1.900 Orang	2.386 Orang	125,57
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Proses Izin Cerai/Permasalahan Keluarga	7 Orang	9 Orang	128,57
4	Fasilitas Pindah/Purna Tugas ASN	Proses Pensiun Janda/Duda dan Yatim serta Pensiun atas Permintaan Sendiri	100 Orang	85 Orang	85

## 2 Terwujudnya Prestasi kerja yang Profesional

Analisis pencapaian sasaran 2 : **Terwujudnya Prestasi kerja yang Profesional** dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Terwujudnya Prestasi Kerja yang profesional	1	ASN yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	21	18	85,71
	2	CASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Orang	88	88	100
	3	ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	Orang	2	2	100
	4	ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Fungsional	Orang	7	7	100
<b>Rata-rata Capaian</b>						<b>96,42</b>

Dari Indikator Kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, dapat dilihat 4 indikator untuk sasaran **Terwujudnya Prestasi kerja yang Profesional** yaitu 96, 42 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Capaian (%)</b>				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	ASN yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal	100	305	150	95	85,71
2	CASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan	97	0	0	0	100
3	ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	100	0	24,44	0	100
4	ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Fungsional	100	100	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian</b>		<b>99,25</b>	<b>101,25</b>	<b>68,61</b>	<b>48,75</b>	<b>96,42</b>

Pada sasaran **Terwujudnya Prestasi kerja yang Profesional** jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, capaian Tahun ini menunjukkan angka peningkatan persentase capaian yaitu 96,42 persen artinya jumlah ASN yang melakukan Pendidikan dan pelatihan mengalami peningkatan meskipun belum mencapai 100% dari yang ditargetkan..

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD</b>	<b>Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	ASN yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	286	282	98,60
2	CASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Orang	613	613	100
3	ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	Orang	114	24	21,05
4	ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Fungsional	Orang	470	457	97,23
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>79,22</b>

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator pada sasaran **Terwujudnya Prestasi kerja yang Profesional** belum mencapai target jangka menengah sampai dengan akhir periode RPJMD hal tersebut dikarenakan adanya indikator Kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempunyai pencapaian belum maksimal yaitu pada indikator pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN.



**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator pada sasaran **Terwujudnya Prestasi kerja yang Profesional** ini didukung dengan 4 indikator yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, namun dari 4 indikator tersebut ada 1 indikator mempunyai capaian yang sangat rendah yaitu pada indikator pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN, penyebab rendahnya capaian indikator tersebut dikarenakan jumlah alokasi anggaran yang ditetapkan tidak terpenuhi dan selain itu alokasi anggarannya pada saat perubahan APBD anggarannya dihilangkan atau dihapus. Adapun alternative solusi yang telah dilakukan yaitu melakukan pembicaraan langsung dengan Tim TAPD untuk memberikan alokasi anggaran namun pada kenyataannya memang tidak memungkinkan mengingat kondisi daerah mengalami defisit anggaran.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Terwujudnya Prestasi kerja yang Profesional** adalah sebesar Rp. 2.328.756.200 sebelum perubahan anggaran dan Rp. 721.431.000 setelah perubahan Anggaran dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 619.761.100 atau 85,91 persen.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan perjanjian kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Terwujudnya Prestasi kerja yang Profesional** adalah sebanyak 1 program dan 4 kegiatan, yaitu dapat dilihat tabel dibawah ini :

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	21	18	85,71
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CASN Daerah	88	88	100
		Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN Daerah	2	2	100
		Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi ASN Daerah	7	7	100

### 3 Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai

Analisis pencapaian sasaran 3 : **Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai** dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Kegiatan	4	4	100
	2	Pemeliharaan kendaraan Dinas	Unit	13	13	100
	3	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Unit	9	9	100
	4	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Unit	11	11	100
<b>Rata-rata Capaian</b>						<b>100</b>

Dari sasaran strategis : **Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai** dapat dilihat dari rata-rata capaian telah mencapai target yaitu 100%

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pemeliharaan Gedung Kantor	100	100	50	100	100
2	Pemeliharaan kendaraan Dinas	100	100	100	100	100
3	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100	100	100	28	100
4	Pemeliharaan Peralatan Kantor	100	100	100	0	100
<b>Rata-rata Capaian</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87,5</b>	<b>57</b>	<b>100</b>

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai**, mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 hanya 57% dan pada tahun 2018 mencapai 100%

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Orang	8	10	125
2	Pemeliharaan kendaraan Dinas	Unit	99	99	100
3	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Unit	151	117	77,48
4	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Unit	74	63	85,13
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>96,90</b>

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dapat dilihat indikator kinerja sudah bisa dikatakan optimal dalam pencapaiannya dapat dilihat dari sampai tahun RPJMD yaitu tahun 2018 sudah mencapai 96,90 persen.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan sasaran tahun 2018 **Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai** mencapai 100%

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai** adalah sebesar Rp. 138.550.000 dan terealisasi sebesar Rp. 127.285.696 atau 91,86 persen capaian serapan anggarannya.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai** yaitu 1 Program dan 4 kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 Keg	4 Keg	100
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13 Unit	13 Unit	100

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	9 unit	9 unit	100
		Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor	11 unit	11 unit	100

#### 4 Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai dan Keluarganya

Analisis Pencapaian Sasaran 4 : **Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai dan Keluarganya**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kesejahteraan pegawai dan keluarganya	1	Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan	Orang	445	445	100
	2	Jumlah kenaikan pangkat dan penempatan ASN	Orang	2.395	2.386	99,62
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>99,81</b>	

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, Indikator Kinerja sasaran **Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai dan Keluarganya** dapat dilihat capaian rata-ratanya sebesar 98,81 persen dimana semua kegiatan terlaksana dengan baik, persentase ini menunjukkan bahwa peningkatan Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai

dan Keluarganya menjadi perhatian lebih oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan	100	88,37	175,65	100	100
2	Jumlah kenaikan pangkat dan penempatan ASN	100	82,14	95,61	82,24	99,62
<b>Rata-rata Capaian</b>		<b>100</b>	<b>85,25</b>	<b>135,63</b>	<b>91,12</b>	<b>99,81</b>

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai dan Keluarganya** ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 yaitu 99,81 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu hanya 91,12 persen.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan	Orang	1.324	1.324	100
2	Jumlah kenaikan pangkat dan penempatan ASN	Orang	8262	8074	97,72
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>98,86</b>

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten

Sidenreng Rappang, maka indikator pada sasaran **Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai dan Keluarganya** bisa dikatakan telah mendekati target bisa dilihat dengan rata-rata capaian yaitu sebesar 98,86%

**d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran **Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai dan Keluarganya** ini didukung dengan 2 indikator yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Keberhasilan yang tak kalah penting dari pencapaian sasaran ini yaitu penentuan target dan monitoring berkala atas pencapaian sasaran tersebut serta didukung dengan sumber data yang valid dalam penentuan target.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai dan Keluarganya** adalah sebesar Rp. 305.126.000 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 252.246.594 atau 82,66 persen.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai dan Keluarganya** Tahun 2018 ini adalah sebanyak 1 program dan 2 kegiatan yaitu : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan 2 kegiatan antara lain kegiatan pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi dan Penempatan ASN dapat dilihat pada tabel dibawah :

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi	445	445	100
		Penempatan ASN	2.395	2.386	99,62

## 1.2. Realisasi Anggaran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD tahun 2018

### 1. Belanja Tidak Langsung Tahun 2018

NO	URAIAN PROGRAM	CAPAIAN KEUANGAN PER KEGIATAN			
		KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.590.330.000	1.576.503.500	99,13
		Tunjangan Keluarga	122.500.000	121.935.732	99,54
		Tunjangan Jabatan	162.988.000	161.130.000	98,86
		Tunjangan Fungsional Umum	49.980.000	49.670.000	99,38
		Tunjangan Beras	71.568.000	70.971.600	99,17
		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.164.000	2.786.146	88,06
		Pembulatan Gaji	30.000	19.026	63,42
		Iuran Asuransi Kesehatan	44.520.000	43.632.876	98,01
		<b>Jumlah</b>	<b>2.045.080.000</b>	<b>2.026.648.880</b>	<b>99,09</b>
2	Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	210.003.000	175.320.298	83,48
		<b>Jumlah</b>	<b>210.003.000</b>	<b>175.320.298</b>	<b>83,48</b>
<b>Jumlah Keseluruhan belanja Tidak Langsung</b>			<b>2.255.083.000</b>	<b>2.201.969.178</b>	<b>97,64</b>



## 2. Belanja Langsung Tahun 2018

NO	URAIAN PROGRAM	CAPAIAN KEUANGAN PER KEGIATAN			
		KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga dan Kerohanian	70.931.200	64.092.697	90,36
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000	2.400.000	100
		Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	52.800.000	46.509.256	88,09
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	5.000.000	4.958.250	99,17
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.350.000	4.438.800	82,97
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	78.333.500	77.022.000	98,33
		Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	20.652.000	19.022.000	92,11
		Rapat-rapat koordinasi/konsultasi Keluar Daerah	340.416.000	338.697.225	99,50
		Rapat-rapat koordinasi/konsultasi Dalam Daerah	4.960.000	2.558.700	51,59
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	273.096.700	253.301.700	92,75
		3	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	78.800.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	53.450.000			45.235.696	84,63
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.150.000			950.000	30,16
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	3.150.000			3.150.000	100
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Proses Izin Cerai/Permasalahan Keluarga	5.104.000	5.104.000	100
5	Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	Proses Pensiun Janda/Duda dan Yatim serta Pensiun atas Permintaan Sendiri	48.571.000	35.089.500	72,24

6	Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capain Kinerja Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.255.000	27.005.000	86,40
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	231.688.500	199.188.700	85,97
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	205.296.000	201.600.000	98,20
		Pendidikandan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	220.528.100	155.054.000	70,31
		Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	63.918.400	63.918.400	100
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	66.375.000	50.598.000	76,23
		Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	25.725.000	17.177.994	66,78
		Penyusunan Syarat Jabatan	373.572.200	352.038.359	94,24
		Pengadaan ASN dan PPPK	470.333.400	427.844.156	90,97
		Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	38.820.000	38.786.800	99,91
		Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	131.197.000	23.425.000	17,85
		Penempatan PNS	279.401.000	235.068.600	84,13
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>			<b>3.184.274.000</b>	<b>2.772.184.833</b>	<b>87,06</b>
<b>Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung</b>			<b>5.439.357.000</b>	<b>4.974.154.011</b>	<b>91,44</b>

Secara umum persentase capaian belanja tidak sampai seratus persen disebabkan oleh :

- a. Adanya efisiensi belanja pada SKPD sedangkan target dan realisasi tetap tercapai
- b. Adanya kegiatan yang memang tidak dilaksanakan
- c. Dan adanya kegiatan yang memang menyisakan anggaran dalam pelaksanaannya.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja keuangan untuk tahun selanjutnya maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan kebijakan sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi antara perencanaan dan keuangan sehingga dokumen perencanaan betul-betul dapat dipedomani untuk penentuan anggaran
- b. Mengupayakan program dan kegiatan pada SKPD agar direncanakan sesuai dengan indikator kinerja yang dapat diukur
- c. Mengkoordinasikan dengan semua bidang yang terkait tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dalam pelaksanaannya nanti bisa berjalan dan mencapai target yang ditentukan.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sesuai penegasan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Instansi Pemerintah setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang ditempuh dan dilimpahkan kepadanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat LKJ-IP untuk disampaikan kepada pimpinan pemerintahan sesuai tingkatannya.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan terhadap beberapa indikator kinerja menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategik Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2018 rata-rata adalah 100% dengan realisasi keuangan yang hanya mencapai 91,44%. capaian ini antara lain disebabkan karena beberapa target sasaran yang telah ditetapkan belum mencapai target yang disebabkan oleh adanya kendala administrasi dan keuangan serta kegiatan tersebut memang belum memungkinkan untuk dilaksanakan mengingat kondisi daerah dalam keadaan defisit.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di masa mendatang antara lain yaitu :

1. Untuk mengatasi kekurangan PNS akibat adanya penundaan pengadaan CPNS (moratorium) dan banyaknya PNS yang memasuki usia pensiun maka solusi/strateginya yaitu dengan memfasilitasi mutasi PNS dari Kab/Kota, Provinsi lain, menunggu lulusan IPDN dan memaksimalkan PNS yang ada serta memaksimalkan teknologi informasi (sistem) untuk menggantikan pekerjaan yang sifatnya rutin
2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ;

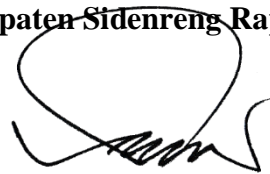
3. Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan ;
4. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS yang didukung reward and punishment yang jelas dan tegas;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian secara manual dan elektronik serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi ;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Tahun 2018 untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang

Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, 23 Januari 2019

**Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan  
Dan Pelatihan Daerah  
Kabupaten Sidenreng Rappang**



**SUDIRMAN BUNGI, S.IP., M.Si**  
**N I P : 19700827 199009 1 002**